BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Hubungan Internasional

Hubungan internasional yang pada dasarnya merupakan studi mengenai interaksi lintas batas Negara oleh *state actor* maupun *non-state actor* memiliki berbagai macam pengertian. Dalam buku "Pengantar Ilmu Hubungan Internasional" Anak Agung Banyu Perwita & Yanyan Mochamad Yani. menyatakan bahwa:

> "Studi tentang Hubungan Internasional banyak diartikan sebagai suatu studi tentang interaksi antar aktor yang melewati batas-batas Negara. Terjadinya Hubungan Internasional merupakan suatu keharusan sebagai akibat adanya saling ketergantungan dan bertambah kompleksnya kehidupan manusia dalam masyarakat internasional sehingga interdependensi tidak memungkinkan adanya suatu Negara yang menutup diri terhadap dunia luar" (Perwita & Yani, 2005:3-4).

Hubungan internasional dapat dilihat dari berkurangnya peranan Negara sebagai aktor dalam politik dunia dan meningkatnya peranan aktor-aktor non-Negara. Batas-batas yang memisahkan bangsa-bangsa semakin kabur dan tidak relevan. Bagi beberapa aktor non-Negara bahkan batas-batas wilayah secara geografis tidak dihiraukan (Perwita & Yani, 2005:3).

Berakhirnya Perang Dingin telah mengakhiri sistem bipolar dan berubah pada multipolar atau secara khusus telah mengalihkan persaingan yang bernuansa militer kearah persaingan atau konflik kepentingan ekonomi di antara Negara-negara di dunia. Pasca Perang Dingin, isu-isu Hubungan Internasional yang

sebelumnya lebih terfokus pada isu-isu *high politics* (isu politik dan keamanan) meluas ke isu-isu *low politics* (isu-isu HAM, ekonomi, lingkungan hidup, dan terorisme) (Perwita dan Yani, 2005:7).

Dalam usaha sebuah negara untuk menyelesaikan suatu masalah yang bersifat regional maupun internasional bisa diselesaikan bersama dengan kerjasama, dalam kerjasama ini terdapat kepentingan-kepentingan nasional yang bertemu dan tidak bisa dipenuhi di negaranya sendiri. Kerjasama menurut Holsti (1988), yaitu:

> "Kerjasama yaitu proses-proses dimana sejumlah pemerintah saling mendekati dengan penyelesaian yang diusulkan, merundingkan atau membahas masalah, mengemukakan bukti teknis untuk menyetujui satu penyelesaian atau lainnya, dan mengakhiri perundingan dengan perjanjian atau perundingan tertentu yang memuaskan kedua belah pihak" (Betsil, 2008: 21).

Dalam suatu kerjasama internasional bertemu berbagai macam kepentingan nasional dari berbagai negara dan bangsa yang tidak dapat dipenuhi di dalam negerinya sendiri (Perwita dan Yani, 2005: 33).

Dalam usaha sebuah Negara untuk menyelesaikan suatu masalah yang bersifat regional maupun internasional bisa diselesaikan bersama dengan kerjasama, dalam kerjasama ini terdapat kepentingan-kepentingan nasional yang bertemu dan tidak bisa dipenuhi di Negaranya sendiri. Menurut Muhadi Sugiono, dalam bukunya "*Global Governance* Sebagai Agenda Penelitian Dalam Studi Hubungan Internasional" ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan dalam kerjasama internasional:

1. Negara bukan lagi sebagai aktor eksklusif dalam politik internasional melainkan hanya bagian dari jaringan interaksi politik, militer, ekonomi dan kultural bersama-sama dengan aktor-aktor ekonomi dan masyarakat sipil.
2. Kerjasama internasional tidak lagi semata-mata ditentukan oleh kepentingan masing-masing Negara yang terlibat di dalamnya, melainkan juga oleh institusi internasional, karena institusi internasional seringkali bukan hanya bisa mengelola berbagai kepentingan yang berbeda dari Negara-negara anggotanya, tetapi juga memiliki dan bisa memaksakan kepentingannya sendiri (Sugiono, 2006:6).

Dalam suatu kerjasama internasional bertemu berbagai macam kepentingan nasional dari berbagai Negara dan Bangsa yang tidak dapat dipenuhi di dalam negerinya sendiri. Kerjasama internasional adalah sisi lain dari konflik internasional yang juga merupakan salah satu aspek dalam hubungan internasional. Isu utama dari kerjasama internasional yaitu berdasarkan pada sejauh mana keuntungan bersama yang diperoleh melalui kerjasama tersebut dapat mendukung konsepsi dari kepentingan tindakan yang unilateral dan kompetitif. Kerjasama internasional terbentuk karena kehidupan internasional meliputi berbagai bidang seperti ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup, pertahanan dan keamanan (Perwita dan Yani, 2005:33-34).

2.1.2 Kerjasama Internasional

Pola interaksi Hubungan Internasional tidak dapat dipisahkan dengan segala bentuk interaksi yang berlangsung dalam pergaulan masyarakat internasional, baik

oleh pelaku negara (*state actor*) maupun oleh pelaku bukan negara (*non-state actor*). Pola hubungan atau interaksi ini dapat berupa kerjasama (*cooperation*), persaingan (*competition*), dan pertentangan (*conflict*) (Rudy, 2003:2).

Dalam suatu kerjasama internasional bertemu berbagai macam kepentingan nasional dari berbagai negara dan bangsa yang tidak dapat dipenuhi di dalam negerinya sendiri. Kerjasama internasional tidak dapat dihindari oleh negara atau aktor-aktor internasional lainnya. Keharusan tersebut diakibatkan adanya saling ketergantungan diantara aktor-aktor internasional dan kehidupan manusia yang semakin kompleks, ditambah lagi dengan tidak meratanya sumber daya-sumber daya yang dibutuhkan oleh para aktor internasional. Dalam suatu kerjasama internasional bertemu berbagai macam kepentingan nasional dari berbagai negara dan bangsa yang tidak dapat dipenuhi di dalam negerinya sendiri. Kerjasama internasional adalah sisi lain dari konflik internasional yang juga merupakan salah satu aspek dalam hubungan internasional. Isu utama dari kerjasama internasional yaitu berdasarkan pada sejauh mana keuntungan bersama yang diperoleh melalui kerjasama tersebut dapat mendukung konsepsi dari kepentingan tindakan yang unilateral dan kompetitif. Kerjasama internasional terbentuk karena kehidupan internasional meliputi berbagai bidang seperti ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup, pertahanan dan keamanan (Perwita & Yani, 2005:33-34).

Beberapa faktor yang perlu diperhatikan di dalam kerjasama internasional, adalah:

1. Pertama, negara bukan lagi sebagai aktor eksklusif dalam politik internasional melainkan hanya bagian dari jaringan interaksi politik, militer, ekonomi dan kultural bersama-sama dengan aktor-aktor ekonomi dan masyarakat sipil.
2. Kedua, kerjasama internasional tidak lagi semata-mata ditentukan oleh kepentingan masing-masing negara yang terlibat di dalamnya, melainkan juga oleh institusi internasional, karena institusi internasional seringkali bukan hanya bisa mengelola berbagai kepentingan yang berbeda dari negara-negara anggotanya, tetapi juga memiliki dan bisa memaksakan kepentingannya sendiri (Sugiono, 2006:6).

2.1.2.1 Kerjasama Multilateral

Kerjasama Multilateral atau Multilateralisme adalah suatu istilah hubungan internasional yang menunjukkan kerjasama antar beberapa negara. Sebagian besar organisasi internasional, seperti dengan PBB (Perserikatan Bangsa-bangsa), bersifat multilateral. Pendukung utama multilateralisme secara tradisional adalah negara-negara berkekuatan menengah seperti Kanada dan negara-negara Nordik. Negara-negara besar sering bertindak secara unilateral, sedangkan negara-negara kecil hanya memiliki sedikit kekuatan langsung terhadap dalam urusan internasional, selain berpartisipasi di PBB, misalnya dengan mengkonsolidasikan suara mereka dengan negara-negara lain dalam pemungutan suara yang dilakukan di PBB. Kerjasama Multilateral sering disebut sebagai *law making treaties* karena hanya mengatur hal-hal yang menyangkut kepentingan umum dan bersifat "terbuka". Kerjasama Multilateral tidak saja

mengatur kepentingan Negara-negara yang mengadakannya, melainkan juga kepentingan Negara lain yang tidak turut (bukan peserta) dalam kerjasama multilateral tersebut. Kerjasama Multilateral adalah kerja sama yang diadakan oleh lebih dari dua Negara dan sering disebut sebagai *law making treaties* karena mengatur hal-hal yang menyangkut kepentingan umum.

2.1.3 Organisasi Internasional

Organisasi-organisasi internasional tumbuh karena adanya kebutuhan dan kepentingan mesyarakat antar-bangsa untuk adanya wadah serta alat untuk melaksanakan kerjasama internasional. Sarana untuk mengkoordinasikan kerjasama antar-negara dan antar-bangsa kearah pencapaian tujuan yang sama dan yang perlu diusahakan secara bersama-sama. Salah satu kajian utama dalam studi hubungan internasional adalah organisasi internasional yang juga merupakan salah satu aktor dalam hubungan internasional (Perwita & Yani, 2005:91).

Teuku May Rudy menjelaskan bahwa ada beberapa macam penggolongan organisasi internasional. Suatu organisasi internasional dapat sekaligus menyandang lebih dari satu macam penggolongan, bergantung pada segi yang ditinjau dalam menggolongkannya. Secara terperinci penggolongan organisasi internasional ada bermacam-macam segi tinjauan berdasarkan delapan hal, yaitu sebagai berikut:

1. Kegiatan Administrasi: organisasi internasional antar pemerintah (*Intergovernmental Organization*/IGO) dan organisasi internasional Non-pemerintah (*Non-Governmental Organization*/NGO).

2. Ruang Lingkup (wilayah) Kegiatan dan Keanggotaan: organisasi internasional global dan organisasi internasional regional.
3. Bidang Kegiatan (operasional) Organisasi: bidang ekonomi, lingkungan hidup, pertambangan, komoditi (pertanian, industri) bidang bea cukai dan perdagangan internasional.
4. Tujuan dan Luas Bidang Kegiatan Organisasi: organisasi internasional umum dan organisasi internasional khusus.
5. Ruang Lingkup (wilayah) dan Bidang Kegiatan: global-umum dan global-khusus, regional-umum dan regional-khusus.
6. Menurut Taraf Kewenangan (kekuasaan): organisasi supranasional (*supranational organization*) dan organisasi kerjasama (*cooperative organization*) (Rudy, 2009:94-97).

Teuku May Rudy mendefinisikan organisasi internasional dalam bukunya "Administrasi dan Organisasi Internasional" sebagai berikut:

> "Pola kerjasama yang melintasi batas-batas negara, dengan didasari struktur organisasi yang jelas serta diharapkan atau diproyeksikan untuk berlangsung serta melaksanakan fungsinya secara berkesinambungan dan melembaga guna mengusahakan tercapainya tujuan-tujuan yang diperlukan serta disepakati bersama, baik antara pemerintah dengan pemerintah, maupun antara sesama kelompok non-pemerintah pada Negara yang berbeda"(Rudy, 2009:3).

Berdasarkan definisi diatas, maka Organisasi Internasional kurang lebih harus mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Kerjasama yang ruang lingkupnya melingkupi batas-batas Negara.
2. Mencapai tujuan-tujuan yang disepakati bersama.
3. Mencakup hubungan antar pemerintah maupun non-pemerintah.

4. Struktur organisasi yang jelas dan lengkap.
5. Melaksanakan fungsi secara berkesinambungan (Rudy, 2009:3).

Negara-negara yang tergabung dalam keanggotaan suatu organisasi internasional berhak meminta bantuan berupa saran, rekomendasi atau aksi langsung berkaitan dengan masalah-masalah dimana pemerintah tidak dapat mengambil resiko dengan hanya bertindak melalui kebijakan nasionalnya. Bahkan saat ini organisasi internasional dapat mempengaruhi tingkah laku Negara secara tidak langsung, dimana kehadiran mereka (baca: organisasi internasional) mencerminkan kebutuhan suatu masyarakat dunia untuk bekerjasama dalam menangani suatu permasalahan.

2.2.4 Isu Lingkungan Hidup dalam Hubungan Internasional

Hubungan Internasional merupakan bagian dari ilmu sosial yang kajiannya bersifat dinamis, kian berkembang seiring berjalannya waktu. Berawal dari hanya membahas keamanan dan perdamaian dunia, semakin lama kajian Ilmu Hubungan Internasional pun semakin kaya dengan kehadiran isu-isu baru. Tepatnya pada tahun 1970an, *Green Perspective* yang membahas mengenai isu lingkungan hidup mulai muncul sebagai kekuatan politik di banyak negara (Paterson, 2001: 235).

Seperti yang disebutkan oleh Jakson dan Sorensen (2009) serta Jill Steans, et al. (2005), kemunculan *Green Perspective* pun ditandai dengan kehadiran 144 negara pada Konferensi PBB yang membahas tentang Linkungan Hidup Manusia atau *United Nations Conference on the Human Environment* (UNCHE) di Stockholm pada tahun 1972 sebagai pertemuan tingkat global pertama dalam

sejarah dunia. Masyarakat dunia mulai sadar akan pentingnya lingkungan hidup. Itulah mengapa kemudian lingkungan hidup menjadi isu area utama ketiga setelah keamanan internasional dan ekonomi global dalam Hubungan Internasional (Porter & Brown, 1996:1 dalam Jackson & Sorensen, 2009: 324).

Sama seperti perspektif-perspektif lainnya, *Green Perspective* sebagai suatu pandangan baru dalam Hubungan Interasional memiliki tiga asumsi sebagai dasar dari argumen-argumen yang dilontarkan oleh para pemikirnya (Steans, et al., 2005: 217).

1. Pertama, *Green Perspective* menenkankan global di atas internasional. Bagi mereka, komunitas global serta hak-hak masyarakat global perlu diakui guna mengontrol sumber daya yang ada.
2. Kedua, menurut pemikir *Green Perspective*, praktek manusia saat ini dalam beberapa cara dapat dikatakan tidak sinkron atau tidak sesuai dengan dunia non-manusia.
3. Ketiga, di mata *Green Perspective* praktek-praktek modern yang didukung oleh sistem filosofis antroposentrisme telah kritis dalam menyebabkan krisis lingkungan. Hal tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh Dobson (1990) dengan argumennya yang dikenal dengan sebutan "*limits to growth*" tentang krisis lingkungan (Paterson, 2001: 237).

Dapat dikatakan bahwa sejatinya *Green Perspective* masih memiliki kesamaan titik fokus dengan tiga perspektif tradisional Hubungan Internasional - Realisme, Liberalisme, dan Marxisme dalam hal *human being* atau *antroposentrisme*.

Para pemikir dari *Green Perspective* berpendapat bahwa harus ada keseimbangan antara lingkungan dengan pembangunan. Dalam pelaksanaan suatu pembangunan, harus memperhatikan dampak bagi lingkungan. Begitu juga sebaliknya. Jika ingin memiliki lingkungan yang baik, maka kegiatan pembangungan harus diminimalisir. Jika ingin memiliki pembangunan yang pesat, maka potensi krisis lingkungan pun juga tinggi (Steans, et al., 2005).

Tidak hanya itu, *Green Perspective* juga berargumen mengenai produksi massal yang dilakukan oleh industri. Menurut mereka, kegiatan produksi tersebut dapat mengancam jumlah sumber daya material maupun energi yang terhitung langka. Jumlah masyarakat yang semakin meningkat rupanya juga tidak luput dibahas oleh *Green Prespective*. Dengan bertambahnya angka kelahiran, untuk kesekian kalinya potensi terjadinya krisis lingkungan pun turut meningkat. Selain itu, penganut *Green Perspective* juga melihat bahwa aktivitas sosial dan ekonomi manusia saat ini berlangsung dengan cara yang mengancam kelangsungan lingkungan hidup (Jackson & Sorensen, 2009: 323).

Sesuai dengan yang disebutkan oleh Jackson dan Sorensen (2009: 327), kontribusi Green Prespective dalam Hubungan Internasioal dapat dilihat dengan adanya beberapa kerjasama internasional yang terjalin antara negara-negara yang ada di dunia dengan adanya permasalahan lingkungan hidup. Salah satu contoh rezim yang berhasil adalah rezim ozon. Pembentukan rezim ozon tersebut mulai dibentuk pada tahun 1970an, tepatnya 1974 ketika dua ilmuwan berkebangsaan Amerika memperdebatkan tentang bahaya CFC yang dapat menyebabkan lapisan

ozon menipis bahkan berlubang. Rezim tersebut berisi tentang persetujuan untuk memotong bahkan menghentikan produksi CFC (Greene, 2001: 402).

Masih sama dengan perspektif-perspektif yang lain, *Green Perspective* pun bukanlah cara pandang yang sempurna dalam Hubungan Internasional. *Green Perspective* mendapatkan kritik mengenai argumennya mengenai hubungan manusia dengan dunia non-manusia. Pasalnya, untuk menciptakan hubungan yang sinkron antara keduanya membutuhkan perubahan besar dalam semua aspek perilaku sosial dan politik yang ada selama ini. Selain sulit, perubahan tersebut mustahil untuk dilakukan karena tatanan sistem dunia yang ada selama ini otomatis akan berubah pula. Selain itu, *Green Perspective* juga mendapatkan kritik atas argumen mereka yang mengatakan bahwa masalah yang berkaitan dengan lingkungan hidup dapat diselesaikan dengan politik global yang tentu saja bertentangan asumsi mereka yang menolak antroposentrisme. Hal ini dikarenakan sejatinya dalam menyelesaikan suatu permasalahan, politik global masih mengutamakan kepentingan manusia atau human interest yang merupakan bagian dari antroposentrisme (Steans, et al., 2005: 229).

Isu lingkungan hidup menjadi perbincangan hangat di kancah dunia internasional pasca terjadinya perang dingin. Beberapa negara mulai menyadari pentingnya lingkungan untuk kelangsungan hidup bagi generasi di masa yang akan datang. Dengan meningkatnya kesadaran lingkungan masyarakat dunia umumnya dan kalangan pemerintahan ditingkat negara-bangsa khususnya dan bertambahnya persoalan kemerosotan lingkungan hidup yang sudah menyentuh kehidupan kita sehari-hari, seperti memanasnya suhu bumi dan meningkatnya

jenis dan kualitas penyakit akibat berlubangnya lapisan ozon, maka isu lingkungan hidup diangkat dalam agenda percaturan internasional (Rudy, 2009:58).

Dalam Undang-undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Lingkungan Hidup didefinisikan sebagai kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya (http://jdih.menlh.go.id/pdf Diakses pada 2 Maret 2015).

Sedangkan pengertian lain secara ekologis (secara umum ekologi diartikan sebagai hubungan antara organisme dan habitatnya, atau ilmu yang mempelajari tentang hubungan antara makhluk hidup dengan lingkungannya), manusia adalah bagian dari lingkungan hidup (Wardhana, 2004:10).

2.2.4.1 Sejarah Perkembangan Isu Lingkungan

Isu lingkungan hidup pertama kali diangkat sebagai sebagai salah satu agenda dalam pertemuan negara-negara dalam ranah hubungan internasional pada tahun 1970-an, hal ini ditandai dengan diselenggarakannya Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang lingkungan hidup pada tahun 1972 di Stockholm, Swedia yang lebih dikenal dengan *Stockholm Conference*. Sejak tahun ini isu lingkungan hidup dan pembangunan menjadi agenda penting di forum regional dan multilateral hal ini dikukuhkan dengan diadakannya beberapa pelaksanaan konferensi internasional antara lain:

1. Mengenai "*Human Environment*" di Stocholen Swedia.
2. Konferensi kedua dalam sidang majelis umum PBB ke-27 membentuk *Governing Council United Nations Environment Program* (GC-UNEP) yang memberi mandat antara lain: Mendorong kerjasama internasional di lingkungan hidup, menerbitkan laporan mengenai kondisi lingkungan global termasuk mengkaji dampak penerapan dampak kebijakan dalam lingkungan bagi kegiatan-kegiatan pembangunan di negara berkembang.

Setelah itu tahun 1982 disahkan *World Chapter for Nature* dan Deklarasi Nairobi yang isinya menekankan kembali keprihatinan masyarakat dunia terhadap semakin meningkatnya kerusakan lingkungan dan urgensinya penanganan masalah ini melalui kerjasama global. Kemudian Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) bumi di Rio de Jenairo Brazil tahun 1992. Yang menegaskan penilaian masyarakat internasional perlindungan masalah lingkungan hidup menjadi masalah bersama dan pembangunan lingkungan hidup tidak lepas dari pembangunan sosial dan ekonomi.

Konferensi yang diadakan oleh PBB yang diadakan di Stockholm Swedia dengan alasan semakin menurunnya kualitas lingkungan dan semakin meningkatnya konsen masyarakat dunia pada saat itu, dalam hal ini juga didasarkan atas kekhawatiran banyak kalangan pemerhati lingkungan di Eropa. Selain itu pada saat itu juga terbit buku riset kajian *Club of Rome*, yang berjudul *The Limits to Growth, Club of Rome* merupakan kelompok *think tank* berpengaruh di Eropa, dalam buku tersebut memaparkan bahwa seiring kemajuan pesat indutri dan pertumbuhan penduduk dunia sumber daya alam di bumi semakin menipis,

dimana kemudian hal ini menjadi penyebab negatif yang merusak tata lingkungan global yang jika keadaan seperti ini terus dibiarkan akan berefek buruk dan menciptakan krisis pangan dan krisis sumber daya secara global.

Konferensi lingkungan hidup PBB yang berlangsung di Stockholm tersebut kemudian menghasilkan sebuah resolusi mengenai pembentukan *United Nations Environmental Program* (UNEP), dapat dikatakan bahwa UNEP merupakan awal pelaksana komitmen mengenai lingkungan hidup dalam hubungan kerjasama antar negara, yang kemudian melahirkan gagasan dari pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development*) dengan pertemuan-pertemuan serta pembahasan yang berkesinambungan, dan diangkat secara global dalam forum dan konferensi internasional. Dalam perkembangannya konferensi-konferensi internasional yang membahas mengenai masalah lingkungan dari tahun ketahun seperti yang tertera diatas, terus diadakan dalam mencari solusi dalam penanggulangan masalah yang dianggap sulit dalam tata lingkungan hidup global saat ini, pertemuan antar negara-negara dalam membahas masalah lingkungan hidup terangkum dalam UNFCCC (*United Nations Framework Convention on Climate Change*), dimana hasil dari salah satu pertemuan UNFCCC yang diadakan yaitu mengenai kesepakatan negara-negara pada tahun 1997 untuk membuat konsensus penanganan lingkungan yang dirangkum dalam suatu protokol yang disebut *Protocol Kyoto*, hingga dalam perkembangan berikutnya pertemuan lingkungan yang melibatkan negara-negara masih terus dilakukan dalam lingkup UNFCCC (http://www.theglobal-review.com/ Diakses pada 4 Maret 2015).

2.2.4.2 Pariwisata Berkelanjutan

Sustainable Tourism (Pariwisata Berkelanjutan) adalah pariwista yang berkembang sangat pesat, termasuk pertambahan arus kapasitas akomodasi, populasi lokal dan lingkungan, dimana perkembangan pariwisata dan investasi – investasi baru dalam sektor pariwisata seharusnya tidak membawa dampak buruk dan dapat menyatu dengan lingkungan, jika kita memaksimalkan dampak yang positif dan meminimalkan dampak negatif. Maka beberapa inisiatif diambil oleh sektor publik untuk mengatur pertumbuhan pariwisata agar menjadi lebih baik dan menempatkan masalah akan *sustainable tourism* sebagai prioritas karena usaha atau bisnis yang baik dapat melindungi sumber – sumber atau asset yang penting bagi pariwisata tidak hanya untuk sekarang tetapi dimasa depan.

Pariwisata berkelanjutan atau *sustainable tourism* adalah sebuah konsep turunan dari konsep pembangunan berkelanjutan yang ada pada laporan *World Commission on Environment and Development*, berjudul *Our Common Future* (atau lebih dikenal dengan *the Brundtland Report*) yang diserahkan ke lembaga PBB pada tahun 1987 (Mowforth dan Munt, 2003 : 58).

Pembangunan berkelanjutan merupakan suatu proses pembangunan yang berusaha untuk memenuhi kebutuhan sekarang dan selanjutnya diwariskan kepada generasi mendatang. Singkat kata, dengan pembangunan berkelanjutan generasi sekarang dan generasi yang akan datang mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk menikmati alam beserta isinya.

Sedangkan pariwisata berkelanjutan sendiri adalah sebuah proses dan sistem pembangunan pariwisata yang dapat menjamin keberlangsungan atau keberadaan

sumber daya alam, kehidupan sosial-budaya dan ekonomi hingga generasi yang akan datang. Intinya, pariwisata berkelanjutan adalah pariwisata yang dapat memberikan manfaat jangka panjang kepada perekonomian lokal tanpa merusak lingkungan.

Salah satu mekanisme dari pariwisata berkelanjutan adalah ekowisata yang merupakan perpaduan antara konservasi dan pariwisata, yaitu pendapatan yang diperoleh dari pariwisata seharusnya dikembalikan untuk kawasan yang perlu dilindungi untuk pelestarian dan peningkatan kondisi social ekonomi masyarakat di sekitarnya. Ekowisata menurut *International Ecotourism Society* adalah perjalanan yang bertanggung jawab ke tempat-tempat yang alami dengan menjaga kelestarian lingkungan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Munculnya istilah *responsible tourism* atau pariwisata yang bertanggung jawab seakan ingin melengkapi konsep-konsep terdahulu. Definisi pariwisata berkelanjutan menurut sebagian orang agak sulit dipahami maksud dan operasionalisasinya secara langsung, sedangkan definisi ekowisata cenderung mengarah hanya kepada wisata berbasis alam terutama kawasan yang dilindungi seperti taman nasional dan cagar alam. Tujuan yang ingin dicapai oleh *responsible*

tourism sesungguhnya sama dengan kedua konsep sebelumnya yaitu pariwisata yang berusaha meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat. Tetapi *responsible tourism* lebih menekankan pilihan yang diambil oleh konsumen dalam menentukan tujuan wisata, akomodasi, model transportasi dan cara melakukan perjalanan, misalnya memilih mengatur sendiri perjalanannya dibandingkan mengikuti kelompok tur *Responsible tourism* juga menekankan

kesadaran wisatawan itu sendiri untuk meminimalkan dampak-dampak negatif dari kunjungannya ke suatu tempat (Kurniawati, 2013:29).

2.2.4.2.1 Pariwisata Hijau

Pariwisata Hijau atau *Green Tourism* sebagai salah satu bentuk ekoturisme atau wisata berbasis ekosistem. *Green Tourism* dapat berarti wisata yang menitikberatkan pada kunjungan ke lokasi satwaliar berada (misal taman nasional dan cagar alam). Jadi *Green Tourism* ini bisa jadi diantaranya adalah kegiatan *hiking* (gerak jalan dan mendaki), *trekking, birding* atau *birdwatching* (pengamatan burung), *snorkeling*, dan *diving*. Pariwisata Hijau juga dapat diartikan sebagai wisata yang berkelanjutan atau artinya tidak mengakibatkan kerusakan di lokasi wisata dan cagar budaya yang sedang dikunjungi (ramah lingkungan).

Green Tourism yang mengusung idealisme ekoturisme berbasis konservasi sebenarnya bukan merupakan barang baru di dunia serta telah diimplementasikan di Indonesia. *Green Tourism* sebagai bagian *green life style* pun perlu dipupuk sedari dini sebagai *green mind*. Beberapa *green tourism* yang dapat dipraktekan, antara lain:

1. Lingkungan

   Praktek *Green Tourism* dapat dimulai dengan cara menghormati alam lingkungan termasuk diantaranya menjaga jarak, tidak menyentuh apalagi menganiaya satwaliar, juga selalu mengikuti jalur trek yang telah disediakan. Juga telah mendukung usaha konservasi dengan cara membayar tiket masuk taman nasional atau kawasan yang dilindungi. Merupakan salah satu praktek

termudah adalah budaya membuang sampah pada tempatnya. Percaya atau tidak wisatawan Indonesia mungkin yang paling susah untuk tertib membuang sampah di manapun mereka berada.

2. Produk Hewani dan Daur Ulang

   Tidak membeli kerajinan tangan dan produk yang berasal dari satwaliar yang dilindungi dan terancam punah. Pakailah juga pakaian yang ramah lingkungan (*second hand field clothing, daypack, carrier, boots*). Pola makan pun diubah agar lebih ramah lingkungan seperti menjadi vegetarian, *ovo - lacto* vegetarian atau yang paling keras vegan.

3. Produk dan Budaya Lokal

   Memilih hotel atau hostel lokal dan ramah lingkungan, memilih makanan di restoran lokal, serta berbelanja di pasar tradisional. Selain lebih murah dengan membeli produk lokal, haltersebut juga mendukung pertumbuhan ekonomi daerah dan menghormati budaya setempat. Yang terpenting adalah untuk selalu memperhatikan tingkah laku dan perkataan dimanapun berada.

4. Pemandu lokal

   Perkaya pengalaman dan mendukung ekonomi lokal dengan menyewa pemandu lokal. Pemandu berlisensi yang telah direkomendasikan operator tur wisata.

5. Transportasi

   Usaha untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dapat dilakukan dengan mengurangi frekuensi penerbangan lokal. Ubah pola transportasi menjadi

sepeda, kereta api, bis atau kapal feri. Tinggal di lokasi wisata untuk jangka waktu yang lama dibanding berpergian jangka pendek.

6. Aksi Konservasi

   Berkontribusi dan ikut berpartisipasi dalam suatu proyek atau program konservasi dapat berdampak positif pada kehidupan masyarakat lokal. Menjadi turis sekaligus *volunteer* dari suatu kegiatan ilmiah berbasis konservasi atau perlindungan alam. Selain dapat memperkaya pengetahuan dan pengalaman hidup juga dapat meningkatkan taraf hidup komunitas lokal.

Enam poin *Green Tourism* yang tercantum sebelumnya merupakan hasil adaptasi prinsip – prinsip ekoturisme *The International Ecotourism Society (TIES). Green Tourism* seperti halnya *Ecotravel, Ecovacation, Eco - (ad)venture, Eco - cruise, Eco - safari, Nature tourism* (wisata alam), *Low impact tourism, Bio - tourism, Ecologically responsible tourism* memang biasa digunakan dalam istilah bisnis pariwisata berbasis ekosistem. Ekoturisme, apresiasi terhadap alam berbentuk produk pariwisata, tidak hanya mengandalkan alasan ekonomi semata tapi tidak berkelanjutan secara ekologis. Apalagi saat ini ekoturisme hanyalah dipandang sebagai suatu bentuk oportunistik atas ekosistem.

Green Tourism dapat lebih bermakna dibanding hanya *taking only pictures and leaving only footprints.* Model wisata ini dapat membuat perbedaan yang lebih berarti bagi pribadi dan dampak berkelanjutan bagi komunitas lokal yang terlibat langsung di dalamnya. Selain itu pula meminimalisir perusakan terhadap alam, mendukung perlindungan suatu kawasan, mengedepankan pemberdayaan komunitas lokal, mengapresiasi lebih kebudayaan dan nilai lokal, serta berfungsi

untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap konservasi alam dan lingkungan sekitarnya (*Special Report, The U.S. Ecotourism Market, WTO, 2002*). Dengan kata lain praktek *Green Tourism* berarti keberlanjutan akan lingkungan, kebudayaan, dan juga komunitas pada lokasi wisata yang dikunjungi (http://www.academia.edu/8018953/Ekologi_Pariwisata Diakses pada 6 Maret 2015).

Dalam mengembangkan pariwisata hijau, terdapat beberapa peluang, diantaranya:

1. Meningkatnya permintaan pasar internasional dan nasional pada produk (paket tur maupun akomodasi) yang ramah lingkungan.
2. Perkembangan ekonomi Indonesia relatif stabil dan meningkat.
3. Meningkatnya jumlah wisatawan mancanegara yang berwisata ke Indonesia dan wisatawan domestik yang berlibur di Indonesia.
4. Meningkatnya jumlah perusahaan penerbangan yang melayani rute ke kawasan-kawasan yang memiliki daya tarik wisata.
5. Meningkatnya jumlah penerbangan berbiaya murah, sehingga meninngkatkan animo berwisata karena keterjangkauan biaya.

Tabel 2.1
Tantangan dalam Pengembangan Pariwisata Hijau

Aspek	Biro Perjalanan	Akomodasi
Umum	1. Bisnis Pariwisata masih sangat tergantung pada faktor eksternal, seperti kondisi politik, konflik sosial masayarakat sekitar kawasan, ekonomi. 2. Bisnis Pariwisata membutuhkan waktu agar produk dikenal pasar.	
Finansial	Dukungan finansial dari lembaga keuangan formal masih sulit di dapatkan karena berbasis jasa.	Pada skala tertemtu, membutuhkan investasi awal yang cukup besar untuk *fix cost*.
Pasar	Pasar sering berfluktuasi tergantung faktor eksternal, sehingga pendapatan kurang stabil, sementara penyesuaian produk membutuhkan waktu dan biaya.	Tren pasar berubah sementara aset tetap, penyesuaian membutuhkan investasi cukup besar.
Standar dan Regulasi	Belum ada regulasi dan standar biro perjalanan hijau di Indonesia.	
Sumber Daya Manusia	Lebih sulit di dapat, khususnya SDM yang berkemampuan mengembangakan tur pariwisata hijau.	

Sumber: (Ary S. Suhandi, http://apgreenjobs.ilo.org/resources/ Diakses pada 6 Maret 2015).

2.2 Kerangka Pemikiran

Sesuai dengan tinjauan pustaka dan teori-teori yang peneliti gunakan dalam peneitian ini, kaitannya dengan penelitian sesuai dengan teori hubungan internasional bahwa pada perkembangannya, kerjasama internasional kini tidak hanya dilakukan oleh Negara dengan Negara saja, tetapi juga dapat dilakukan oleh negara dengan aktor non negara seperti organisasi internasional, individu dan organisasi non-pemerintah, dan aktor-aktor tersebut mempunyai kepentingan dan tujuan dalam melaksanakan kerjasama internasional. Seperti Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) bekerjasama dengan Negara-negara anggotanya melalui *United Nations World Tourism Organization* (UNWTO) untuk membantu mengembangkan pariwisata di Indonesia melalui pariwisata hijau.

Secara kategori Kerjasama Internasional, kerjasama antara Indonesia dengan UNWTO termasuk kedalam Kerjasama Multilateral. Indonesia termasuk anggota UNWTO yang memiliki tujuan pokok untuk meningkatkan dan membangun pariwisata sebagai kontributor bagi pembangunan ekonomi, saling pengertian internasional, perdamaian, kemakmuran universal, HAM dan kebebasan dasar untuk semua tanpa memandang perbedaan ras, jenis kelamin, bahasa dan agama. UNWTO telah membantu para anggotanya dalam industri pariwisata dunia, yang diyakini merupakan faktor penting dalam merangsang pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja, menyediakan insentif untuk melindungi lingkungan dan warisan sejarah, serta mempromosikan perdamaian dan saling pengertian antar-negara. Untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut, UNWTO melaksanakan berbagai program yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan,

memperjuangkan kesetaraan gender, dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Salah satu contoh kerja sama antara Indonesia dengan UNWTO dalam bidang pariwisata yang mendukung pembangunan berkelanjutan adalah program "*Sustainable Tourism through Energy Efficiency with Adaptation and Mitigation Measures in Pangandaran*" yang dimaksudkan untuk menjadi model langkah-langkah adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di daerah-daerah tujuan wisata di Indonesia khususnya, dan Asia Tenggara pada umumnya.

Berdasarkan penggolongan Organisasi Internasional dalam hal kegiatan administrasi, maka *United Nations World Tourism Organization* (UNWTO) termasuk kedalam *Intergovernmental Organization* (IGO) atau organisasi antar pemerintah yang mempunyai tujuan khsusus pada suatu bidang tertentu dan keanggotaannya terbuka untuk seluruh Negara, dalam artian tidak terbatas pada sekelompok Negara tertentu. *United Nations World Tourism Organization* (UNWTO) adalah badan dalam sistem Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) yang tidak membatasi jumlah anggotanya dan mempunyai tujuan khusus dalam menangani pariwisata dunia. Pariwisata sebagai salah satu penggerak perekonomian nasional suatu negara akan membawa anggota-anggota dalam UNWTO untuk berperan agar pariwisata di negara-negara berkembang menjadi lebih maju. Salah satu contoh adalah kerjasama Indonesia dengan UNWTO, dengan menjalin kerjasama melalui program pariwisata berkelanjutan melalui energi efisiensi dengan kegiatan adaptasi dan mitigasi (STREAM - *Sustainable Tourism through Energy Efficiency with Adaptation and Mitigation Measures*) di Pangandaran.

Dalam hal *green tourism*, kerjasama Indonesia dan UNWTO melaksakan praktek-praktek pariwisata hijau dengan melaksanakan aspek lingkungan dan aksi konservasi, antara lain: Mitigasi dimana dilaksanakan reduksi emisi karbon di industri hotel dan pengembangan energi terbarukan untuk fasilitas pariwisata. Dan Adaptasi dimana dilakukan penanaman mangrove dan terumbu karang, peningkatan kesadaran masyarakat akan dampak dariperubahan iklim, dan peningkatan kapasitas untuk perencanaan tanggap perubahan iklim. Dalam hal penanaman mangrove, kegiatan tersebut memiliki andil dalam upaya adaptasi dan mitigasi iklim melalui penyerapan emisi CO_2 yang diantaranya gas rumah kaca, dan terumbu karang merupakan organisme simbion yang dapat berperan sebagai penyerapan karbon di atmosfir, dan menurut para ahli terumbu karang di dunia berpotensi menurunkan jumlah karbon. Hal ini dilalukan untuk menanggulangi perubahan iklim dan upaya dalam melaksanakan pariwisata hijau sesuai dengan kerjasama yang dilakukan Indonesia dengan *United Nations World Tourism Ogranization* (UNWTO) melalui program STREAM.